

Nama : Asnia Sundari

NPM : 2413031040

Mata kuliah : Teori Akuntansi

Pertemuan 4

CASE STUDY

PT Garuda Sejahtera adalah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan. Dalam laporan keuangan terbarunya, perusahaan mengakui pesawat-pesawat yang dimiliki berdasarkan nilai wajar (*fair value*) sesuai dengan pendekatan IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

Namun, auditor memberikan catatan bahwa penentuan nilai wajar tersebut tidak mencerminkan kondisi pasar di Indonesia secara akurat, karena pasar aktif untuk pesawat di Indonesia sangat terbatas. Auditor menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan penggunaan biaya historis (*historical cost*) yang lebih konservatif.

Sementara itu, PT Garuda Sejahtera menyatakan bahwa pendekatan nilai wajar lebih mencerminkan "*substance over form*" dan kebutuhan investor global, karena perusahaan ingin menarik investor asing. Dalam penyusunannya, perusahaan mengacu pada kerangka konseptual IFRS, bukan kerangka konseptual PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Beberapa anggota dewan komisaris mempertanyakan:

1. Apakah penggunaan kerangka konseptual global (IFRS) sah diterapkan untuk perusahaan di Indonesia?
2. Apakah kerangka konseptual PSAK sudah cukup memadai untuk menjawab dinamika bisnis global?
3. Apakah nilai wajar benar-benar mencerminkan realitas ekonomi yang bisa diandalkan dalam konteks Indonesia?

Pertanyaan:

1. Kritisi keputusan PT Garuda Sejahtera dalam memilih nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara konseptual dalam konteks Indonesia? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual PSAK dan IFRS.
2. Bandingkan kerangka konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS dalam hal:
 1. Tujuan laporan keuangan
 2. Karakteristik kualitatif informasi
 3. Basis pengukuran
 4. Asumsi entitas dan kelangsungan usaha
3. Apakah Anda setuju bahwa Indonesia sebaiknya mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal? Jelaskan pendapat Anda dengan argumen kritis, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar di Indonesia.

Analisis Kasus PT Garuda Sejahtera

1. Kritik atas Keputusan PT Garuda Sejahtera Menggunakan Nilai Wajar

Keputusan PT Garuda Sejahtera untuk menggunakan nilai wajar (*fair value*) tidak sepenuhnya dapat dibenarkan secara konseptual dalam konteks Indonesia meskipun perusahaan beralasan bahwa pendekatan ini mencerminkan "*substance over form*" dan menarik investor global. Berikut analisis berdasarkan prinsip kerangka konseptual PSAK dan IFRS:

a) Relevansi vs. Keandalan (IFRS dan PSAK)

IFRS (melalui *Conceptual Framework*) menekankan relevansi informasi, di mana nilai wajar dianggap lebih relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi karena mencerminkan kondisi terkini. Namun, IFRS juga menekankan keandalan (*reliability*) yang memerlukan bahwa informasi harus bebas dari kesalahan material dan bias (Sinaga dan Firdaus, 2024). Dalam kasus ini, auditor menyatakan bahwa pasar aktif untuk pesawat di Indonesia sangat terbatas, sehingga penentuan nilai wajar mungkin tidak andal karena tidak didukung oleh pasar yang likuid. Hal ini melanggar prinsip keandalan dalam kedua kerangka tersebut (PSAK dan IFRS).

b) Kesesuaian dengan Konteks Indonesia (PSAK)

PSAK mengadopsi IFRS tetapi dengan penyesuaian lokal. Adanya PSAK 68 dari penerapan IFRS 13 (Pengukuran Nilai Wajar) mensyaratkan bahwa nilai wajar harus ditentukan berdasarkan pasar aktif (Lahfah, dkk., 2023). Jika pasar tidak aktif, entitas harus menggunakan teknik penilaian (seperti pendapatan atau biaya) yang memerlukan banyak estimasi dan asumsi. Dalam konteks Indonesia, pasar pesawat terbang memang terbatas, sehingga penggunaan nilai wajar menjadi sangat subjektif dan berisiko tinggi. PSAK lebih menekankan kehati-hatian (*prudence*) dalam pengukuran, yang mendukung penggunaan biaya historis jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal.

c) *Substance Over Form* vs. Realitas Ekonomi

Meskipun perusahaan berargumen bahwa nilai wajar mencerminkan "*substance over form*," hal ini hanya valid jika pengukuran tersebut andal. Dalam ketiadaan pasar aktif, nilai wajar mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya di Indonesia, justru berpotensi menyesatkan.

Keputusan PT Garuda Sejahtera tidak dapat sepenuhnya dibenarkan dalam konteks Indonesia karena:

- 1) Nilai wajar sulit diukur secara andal akibat kurangnya pasar aktif.
- 2) PSAK (yang telah mengadopsi IFRS dengan penyesuaian) lebih menekankan kehati-hatian dan keandalan dalam konteks lokal.
- 3) Penggunaan biaya historis (seperti saran auditor) lebih sesuai untuk menjaga keandalan laporan keuangan.

2. Perbandingan Kerangka Konseptual PSAK dan IFRS

Aspek	IFRS (Global)	PSAK (Indonesia)
Tujuan Laporan Keuangan	Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna lain dalam pengambilan keputusan ekonomi.	Sama dengan IFRS, tetapi dengan penekanan pada konteks hukum dan ekonomi Indonesia.
Karakteristik Kualitatif	Relevansi, perwakilan yang faithful (andal dan lengkap), keterbandingan, keterverifikasian, ketepatan waktu, dan keterpahaman.	Sama dengan IFRS, tetapi dengan penekanan lebih pada kehati-hatian (prudence) dan kepatuhan terhadap regulasi lokal.
Basis Pengukuran	Nilai wajar, biaya historis, nilai kini, dan nilai realisasi. Nilai wajar sering diprioritaskan untuk aset tertentu.	Sama dengan IFRS, tetapi penerapan nilai wajar lebih dibatasi jika tidak dapat diukur andal (misalnya, karena pasar tidak aktif).
Asumsi Entitas dan Kelangsungan Usaha	Asumsi kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual (accrual basis).	Sama dengan IFRS, tetapi dengan pertimbangan tambahan terhadap kondisi ekonomi dan politik Indonesia

PSAK sebenarnya telah mengadopsi sebagian besar prinsip IFRS (Taufiq, 2025) tetapi dengan modifikasi tertentu untuk menyesuaikan dengan lingkungan bisnis Indonesia yang unik.

3. Pendapat saya

Saya tidak setuju jika Indonesia mengadopsi sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal sama sekali. Menurut saya, adopsi penuh IFRS tanpa penyesuaian berisiko tinggi untuk Indonesia. Pendekatan yang bijak adalah terus mengkonvergensi PSAK dengan IFRS tetapi dengan mempertimbangkan kondisi lokal agar laporan keuangan tetap andal, relevan, dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Indonesia. Argumen ini mempertimbangkan faktor sebagai berikut.

1. Faktor Ekonomi dan Kematangan Pasar

a) Keterbatasan Pasar Aktif

Seperti dalam kasus PT Garuda Sejahtera, pasar untuk banyak aset (seperti pesawat, properti tertentu, bisnis kecil) di Indonesia tidak seaktif dan selikuid di negara maju. Memaksa penggunaan nilai wajar dalam kondisi ini justru akan menghasilkan informasi yang tidak andal dan sangat spekulatif.

- b) *Tingkat Sophistication Investor*
Mayoritas investor retail di Indonesia mungkin belum sepenuhnya siap untuk memahami kompleksitas dan volatilitas laporan keuangan yang sepenuhnya berbasis nilai wajar. Biaya historis memberikan dasar yang lebih stabil dan mudah dipahami.
- 2. Faktor Sosial dan Hukum
 - a) *Peraturan Perpajakan*
Sistem perpajakan Indonesia masih sangat terkait dengan laporan keuangan komersial. Perubahan drastis dalam pengukuran aset/liabilitas dapat menimbulkan kompleksitas dan distorsi dalam perhitungan pajak.
 - b) *Perlindungan Entitas Kecil dan Menengah (UMKM)*
UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia akan terbebani dengan biaya penerapan standar IFRS yang sangat kompleks. PSAK-ETAP (untuk entitas tanpa akuntabilitas publik) adalah contoh penyesuaian lokal yang brilliant dan perlu dipertahankan.
- 3. *Tingkat Kematangan Pasar*
Investor dan pelaku bisnis di Indonesia mungkin belum sepenuhnya siap dengan kompleksitas IFRS murni. Penyesuaian lokal dalam PSAK membantu transisi yang lebih halus dan memastikan bahwa standar dapat diterapkan secara praktis tanpa mengorbankan keandalan.
- 4. *Kedaulatan Regulasi*
IASB bukanlah badan legislatif. Setiap negara memiliki hak untuk menyesuaikan standar internasional dengan kondisi domestiknya, selama tidak mengurangi substansi. Proses konvergensi (bukan adopsi murni) yang dilakukan Indonesia via PSAK adalah pendekatan yang tepat. Ini memastikan kami sejalan dengan standar global sambil tetap mempertimbangkan realitas lokal.

Keseimbangan yang Ideal

Indonesia sebaiknya tetap melanjutkan kebijakan konvergensi PSAK dengan IFRS. Langkah ini memberikan manfaat terbaik karena dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan perusahaan Indonesia di kancah internasional, menarik investor asing, dan menurunkan *cost of capital*, serta memungkinkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan regulator untuk memberikan penjelasan (*guidance*), pengecualian, atau simplifikasi untuk transaksi-transaksi tertentu yang secara signifikan berbeda konteksnya dengan negara lain, sehingga memastikan laporan keuangan tetap relevan dan andal dalam konteks Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Lahfah, A. A., Maskupah, I., & Faradisyi, Z. N. (2023). Penerapan Nilai Wajar Dalam Penilaian Aset Perusahaan pada Bank Permata Tbk Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 28-37.
- Sinaga, A. M. B., & Firdaus, R. (2024). ANALISIS KEANDALAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEUANGAN. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8875-8882.
- Taufiq, M. U. (2025). Implementation And Challenges Of IFRS Convergence To PSAK In Writing Financial Statements Of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) In Indonesia. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 4(1), 189-194.